

MODEL PEMBELAJARAN PENANGANAN BAHAYA BANJIR DAN LONGSOR^{*)}

Oleh: Dr. Darsiharjo, M.S.^{**)}

PENDAHULUAN

Pada awalnya bahaya banjir dan longsor hampir tidak dikenal oleh manusia, karena pada saat itu populasi manusia yang menghuni planet Bumi jumlahnya masih sangat sedikit, sehingga daya dukung alam pada dinamika kebutuhan hidup manusia masih dapat dipenuhi secara langsung dan disediakan oleh alam. Perkembangan selanjutnya setelah manusia berkembang terus dengan pesat dan pada saat ini telah mencapai 6 milyar lebih penduduk muka bumi ini, mulailah terjadi ketidak seimbangan antara daya dukung yang disediakan oleh alam dengan kebutuhan manusia, sehingga banyak kerusakan dimuka bumi akibat pemaksaan oleh manusia dalam bentuk pengeksploitasian dan penyerobotan sumberdaya alam yang tidak semestinya. Terlampauinya daya dukung alam oleh manusia inilah, yang menyebabkan timbulnya bencana baik berupa bencana banjir maupun bencana longsor.

Indonesia merupakan negara yang memiliki daratan hanya 1/3 dari luas keseluruhan (1.919.440 km²), dan sebagian besar 2/3 wilayahnya adalah perairan, sehingga udaranya memiliki kelembaban cukup tinggi, selain itu wilayah Indonesia memiliki morfologi bervariasi mulai dari

*) Disampaikan pada Seminar Nasional “Model Pendidikan dan Penanganan Bahaya Banjir dan Longsor”. Di Balai Pertemuan UPI Bandung pada tanggal 27 April 2006.

***) Dosen Jurusan Pendidikan Geografi dan Ketua Program Studi Manajemen Resort dan Leisure – FPIPS – UPI.

pegunungan, perbukitan, sampai pedataran, dan curah hujan harian maupun tahunan di Indonesia cukup tinggi. Kondisi ini mengakibatkan Indonesia tergolong pada wilayah yang sangat rawan terhadap bahaya erosi terutama oleh erosi air (Arsyad, 2000).

Morfologi (morfometri dan morfografi) di Indonesia berupa pegunungan dan perbukitan merupakan suatu anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Memang pada satu sisi kondisi ini sangat merugikan dan membahayakan bagi umat manusia, apabila kita tidak dapat memanfaatkan dan mengelola anugerah tersebut. Tetapi kondisi ini juga sangat menguntungkan karena dengan kondisi demikian maka akan tersedia berbagai potensi, seperti:

Saluran irigasi, wilayah Indonesia yang berbukit dan bergunung akan memudahkan untuk dibuat sistem saluran irigasi, sehingga wilayah yang tadinya tidak dapat dibudidayakan, dengan sistem irigasi dapat dibudidayakan untuk lahan pertanian, lahan perkebunan atau lahan perikanan.

Bendungan atau Waduk, wilayah Indonesia yang bergunung dan berbukit biasanya akan banyak ditemukan cekungan yang cukup luas dan pada posisi tertentu dapat dibendung menjadi waduk atau bendungan. Fenomena ini dapat dijadikan sebagai daerah yang potensial untuk perikanan jaring terapung, objek wisata, atau sumber air bersih (bahan baku air minum).

Pembangkit tenaga listrik, wilayah Indonesia yang bergunung dan berbukit biasanya akan terbentuk *gradient topographic* yang tajam sehingga memiliki potensi terbentuknya air terjun, yang dapat mengubah energi potensial menjadi energi kinetik dalam bentuk energi listrik. Energi ini harus terus diupayakan, karena penggunaan energi listrik yang berasal dari terjunan air merupakan energi yang ramah lingkungan (tidak menghasilkan limbah dan tidak mencemari lingkungan).

Pemandangan (view), wilayah Indonesia yang bergunung dan berbukit biasanya akan membentuk perbedaan topografik yang cukup tajam, sehingga pada tempat-tempat tertentu dapat melihat dengan jelas tempat yang lain, hal ini selain kelihatan indah juga dapat menikmati pemandangan alam yang lainnya. Potensi ini cukup baik untuk dikembangkan menjadi Objek dan Daya Tarik Wisata (ODTW).

Budidaya pertanian yang variatif, wilayah Indonesia yang berbukit dan bergunung akan menyebabkan adanya katena tanah, gradient termometrik, kelembaban, dan pola budidaya yang berbeda. Hal ini akan menyebabkan adanya variasi hasil pertanian, mulai dari hasil pertanian yang bercorak tropika sampai pada hasil pertanian yang bercorak iklim sedang. Kondisi ini akan memiliki biodiversity (keanekaragaman hayati) yang tinggi dan aneka fauna yang beraneka ragam (Foresta *et all*, 2000).

Beberapa potensi tersebut, kaitannya dengan bahaya banjir dan longsor, Indonesia merupakan negara yang memiliki potensi bahaya yang sangat tinggi, karena wilayah Indonesia sebagian besar perbukitan dan pegunungan.

Bencana banjir dan longsor agak berbeda dengan bencana alam lainnya seperti: erupsi (letusan gunungapi), gempa bumi (gempa tektonik dan gempa vulkanik), dan tsunami. Karena banjir dan longsor lebih bersifat lokal/setempat dan meliputi wilayah yang tidak luas, serta penyebabnya lebih banyak diakibatkan oleh ulah manusia itu sendiri. Sedangkan erupsi, gempa bumi, dan tsunami lebih bersifat regional dan meliputi wilayah yang luas, serta penyebabnya lebih banyak diakibatkan oleh gejala alam (dinamika kulit bumi).

MODEL PEMBELAJARAN DI SEKOLAH

Para pendidik (guru) di sekolah telah menerapkan berbagai metode dan strategi dalam proses kegiatan belajar mengajar (KBM), yang tujuannya agar anak didik dapat: mengetahui, memahami, menghindari, menanggulangi, dan meminimalisir bahaya banjir dan longsor agar tidak terjadi dan tidak menimbulkan korban.

Strategi yang telah diusahakan oleh para pendidik (guru) diantaranya dalam bentuk: nasehat, ceramah, diskusi, contoh, aksi, perlombaan, buku (referensi), memutar film, *study tour*, membuat poster, membuat aturan, dan tata tertib di sekolah yang menunjang pada penyadaran para siswa akan bahaya banjir dan longsor. Sehingga kalau ditanya apakah sudah mempersiapkan generasi muda yang mampu meminimalisir potensi bencana banjir dan longsor? Pasti jawabannya sudah dan dilakukan secara terus menerus. Tetapi mengapa kenyataannya bencana banjir dan longsor semakin intensif ! Jawabannya pasti menyebutkan bahwa banjir dan longsor diakibatkan oleh aspek lain yang masih lemah, misalnya kurang ditegakkannya hukum, penataan ruang yang tidak terencana, perhatian pemerintah yang masih kurang, aparat yang tidak mengerti akan pembangunan yang berkelanjutan, dan sejumlah alasan lain yang tidak akan cukup disebutkan pada tulisan ini.

Teknik dan metode untuk mengatasi banjir dan longsor sangat detail dipaparkan oleh para pakar spesialis, dan teknik/metode tersebut telah gamblang disampaikan ke peserta didik dengan berbagai metode mengajar. Tetapi pertanyaannya mengapa masyarakat dalam hal ini sebagai produk dari pendidikan tidak dapat meminimalisir bahaya banjir dan longsor ? dan mengapa banjir dan longsor semakin intensif ?

Coba kita tengok ke lingkungan sekolah, untuk sekolah di daerah kemungkinan memiliki lahan yang luas dengan pekarangan dan halaman bermain yang luas (walaupun ini jarang terjadi). Tetapi kita sering menemukan sekolah yang halamannya hampir habis oleh bangunan kelas

dan ruang serbaguna. Sehingga untuk masuk ke dalam kelas seperti masuk lewat terowongan yang terang oleh lampu, dan begitu masuk ke ruang kelas hampir tidak ada ventilasi yang baik, memang kelihatan terang (tetapi oleh lampu) dan bau harum oleh aroma buatan (wewangian) ruangan.

Kondisi sekolah tersebut kalau ditanya mengapa demikian? Maka sejumlah alasan telah siap untuk disampaikan, berbagai dalil diungkapkan yang ujung-ujungnya bahwa ruangan tersebut layak dan dapat dipakai untuk proses belajar mengajar. Hal ini dibuktikan oleh masih banyaknya peminat untuk mengikuti pendidikan di sekolah tersebut walaupun dengan kondisi ruangan yang demikian.

Coba kita tengok pepohonan (hijau daun) di halaman sekolah yang menghasilkan oksigen dan sebagai media untuk menahan air hujan (singgah sementara) agar air hujan tidak langsung mengalir di permukaan tanah. Coba tengok juga apakah air hujan yang jatuh di halaman sekolah dapat disimpan dan tidak dialirkan ke selokan atau tempat lain. Apakah sampah yang dihasilkan oleh sekolah (bekas makanan, minuman, atau kertas) sudah di daur ulang? Sehingga tidak pernah membuang sampah ke tempat lain !

Kalau sekolah sudah membiasakan kesehariannya seperti tersebut di atas, maka sekolah bukan sebagai komponen penyumbang bahaya banjir dan longsor, karena antara teori/pedoman dan praktek keseharian sudah dilaksanakan dengan baik. Kalau sudah seperti ini berarti siapa yang menyebabkan terjadinya banjir dan longsor ? Tentunya harus mengamati komponen lain yang terlibat pada masalah banjir dan longsor.

MODEL PEMBELAJARAN DI MASYARAKAT

Masyarakat pada dasarnya adalah kelompok makhluk sosial yang sedang melakukan proses belajar, yang tentunya substansi antara belajar di sekolah dengan di masyarakat cukup berbeda. Kualitas pendidikan di masyarakat pada dasarnya juga ditentukan oleh kualitas pendidikan masing-masing individu masyarakat itu sendiri. Proses pendidikan yang terjadi di masyarakat lebih menekankan pada pendidikan kebersamaan agar hidup rukun, maju dan sejahtera.

Masyarakat sering dijadikan kambing hitam atas segala bencana yang terjadi terutama bencana banjir dan longsor. Dengan tuduhan tidak mengindahkan rambu-rambu atau peraturan yang diberlakukan di daerah, tidak patuh, berfikir dan bertindak individual. Pada hal kalau kita cermati dan kita amati, ternyata di masyarakat juga telah banyak metode dan strategi untuk meminimalisir bencana banjir dan longsor diantaranya dengan cara: kerja bakti sesama warga, bakti sosial dengan cara membantu warga yang lain, saling mengingatkan diantara warga apabila ada yang menyimpang dan melanggar atau tidak membaur, gotong royong dalam bekerja untuk kepentingan bersama, dan kepedulian warga juga diwujudkan dengan bentuk iuran warga sebagai cadangan apabila ada musibah atau bencana. Tetapi mengapa banjir dan longsor semakin meluas ?

Kalau kita coba membaur dengan masyarakat, dan kita tanyakan mengapa di masyarakat sering tertimpa banjir dan longsor. Mereka dengan sigap akan mengatakan bahwa bencana banjir dan longsor diakibatkan oleh: tidak terencananya pembangunan, hukum yang kurang ditegakkan, kepedulian pemerintah pada lingkungan sangat kurang, pemerintah tidak memihak pada rakyat, bantuan yang selalu terlambat, kurangnya penyuluhan, mengutamakan orang kaya/pengusaha/pejabat/ dan lain sebagainya. Yang seolah-olah masyarakat tidak salah dan komponen yang lainlah yang bersalah dan harus bertanggung jawab.

Coba kita amati di lingkungan masyarakat terutama di perkotaan (di pedesaan pun sering terjadi) selokan/parit yang ada di sampingnya semakin sempit dan dangkal, sehingga air hujan dan air riul tidak dapat mengalir dan tergenang, dampaknya pada penyakit demam berdarah dan penyakit menular lainnya. Saluran buangan air hujan di pinggir lorong/gang/jalan hampir tidak ada dan macet, sehingga jalan berfungsi sebagai saluran air di musim hujan. Tempat sampah di tiap rumah hampir tidak ada dan lebih menyenangi cara membuang sampah dengan dibungkus kantong plastik sehingga tidak bau dan dibuang ke tempat yang lain/pengangkut sampah. Masyarakat yang tinggal di daerah yang bermorfologi datar apalagi di bantaran banjir, jarak rumah cukup berdesakan, halaman rumah diplester sehingga dalam beberapa tahun ketinggian lantai tetap. Di daerah dataran mestinya secara alamiah akan mengalami sedimentasi dan dalam beberapa tahun terus mengalami penambahan tinggi, sedangkan lantai rumah ketinggiannya tetap, maka dalam beberapa tahun akan terjadi bencana banjir. Oleh karena itu bagi masyarakat yang tinggal di daerah pedataran atau dataran banjir harus memperhitungkan laju sedimentasi agar tidak terkena banjir.

Informasi semacam ini jika disampaikan ke masyarakat, masyarakat akan mengajukan berbagai argumentasi atau dalil yang kuat, yang ujung-ujungnya bahwa masyarakat layak dan sudah siap tinggal di daerah tersebut, yang penting pihak-pihak lain terutama pemerintah harus memperhatikan rakyat kecil, karena kami mau pindah kemana lagi dan sejak dulu kami sudah tinggal ditempat ini.

Uraian tersebut menunjukkan bahwa masyarakat sudah sangat sadar dan tahu bagaimana cara meminimalisir bahaya banjir dan longsor dengan berbagai strategi dan metode yang telah digunakan oleh masyarakat dalam kehidupan kesehariannya. Tetapi mengapa banjir dan longsor semakin sering ? Kalau begitu siapa yang salah ! Tentunya harus mengamati komponen lain yang terlibat pada masalah banjir dan longsor.

MODEL PEMBELAJARAN YANG DILAKUKAN OLEH PEMERINTAH

Pemerintah pada dasarnya adalah sebuah lembaga yang mendidik masyarakat kearah yang lebih baik dalam rangka untuk mencapai tujuan pembangunan nasional. Keberhasilan pemerintah dalam mengarahkan dan memfasilitasi dinamika masyarakat juga ditentukan oleh kualitas individu atau kelompok masyarakat itu sendiri. Semakin tinggi tingkat pendidikan atau kesadaran masyarakat akan bahaya banjir dan longsor maka akan semakin mudah dan ringan dalam mencegah, mengatasi, dan merehabilitasi bencana banjir dan longsor (Odum, 1996). Apakah bahaya banjir dan longsor yang semakin sering terjadi akibat tingkat pendidikan dan kesadaran masyarakat yang masih rendah ? mungkin jawabannya ya! Karena tingkat pendidikan masyarakat Indonesia baru pada level sekolah dasar. Tetapi mengapa bahaya banjir dan longsor sering terjadi justru pada saat tingkat pendidikan dan kesadaran masyarakat semakin tinggi? Sedangkan pada masa lampau, pada saat pendidikan masyarakat masih rendah justru hampir tidak pernah terdengar bencana banjir dan longsor?

Tentunya pendidikan yang mana dulu yang dimaksud, apakah pengetahuan yang dimiliki oleh masyarakat atau keterdidikannya (patuh, taat, malu jika salah, takut berdosa, dan sebagainya). Hal-hal semacam ini tentunya harus menjadi perhatian pemerintah dalam mengatasi berbagai persoalan.

Kalau kita mencoba menelaah atau mencoba memahami berbagai kebijakan yang telah di lakukan oleh pemerintah nampaknya sudah cukup komprehensif. Kalau berbicara pemerintah berarti membicarakan diri kita sendiri, karena pemerintah dalam hal ini yang sedang memegang kekuasaan, tentunya kita juga yang memilih dan kita pun punya wakil untuk menyuarakan aspirasi kita dalam mewarnai berbagai kebijakan. Sebagai contoh kita yang hadir di ruangan ini umumnya adalah Pegawai

Negeri atau Calon Pegawai Negeri atau sedang menunggu untuk menjadi Calon Pegawai Negeri, dan mungkin ada juga pegawai swasta.

Bagi kita yang tergolong pada Pegawai Negeri tentunya kita adalah kepanjangan tangan atau wakil dari pemerintah untuk menterjemahkan dan memfasilitasi berbagai kebijakan dan dinamika kehidupan masyarakat. Peran pemerintah dalam meminimalisasi bahaya banjir dan longsor telah mengeluarkan berbagai bentuk: aturan, bantuan, perbaikan, penyuluhan, pencegahan, penghargaan, bahkan hukuman bagi yang melanggar. Semua aturan dan kebijakan itu tentunya kita yang melaksanakannya, tetapi mengapa bahaya banjir dan longsor semakin sering ?

Bagi kita yang sedang menunggu untuk menjadi Pegawai Negeri atau mungkin pegawai swasta, telah merasakan berbagai fasilitas beasiswa, fasilitas umum, kebebasan untuk menuntut ilmu dan berusaha, bahkan telah menikmati berbagai kemudahan untuk membina lingkungan dalam berbagai bentuk LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat). Tetapi mengapa banjir dan longsor hampir tidak pernah reda?

Memang kita sering merasakan masih banyaknya kekurangan dan kelemahan pemerintah, terutama pada saat kita terkena musibah atau bencana. Tetapi pada saat kita mendapatkan keuntungan dan keberhasilan, kita jarang mengumumkan pada masyarakat bahwa kita lagi mendapat pelayanan terbaik dari pemerintah (sikap ini bertentangan dengan ajaran agama). Ajaran agama telah memerintahkan pada kita bahwa beritahulah orang lain apabila mendapat kebahagiaan, dan jangan menyebarkan kegagalan dan ketidak suksesan pada orang lain.

Uraian tersebut di atas, nampaknya apa yang telah dilakukan pemerintah juga telah optimal, tetapi mengapa banjir dan longsor malah semakin luas ? Kalau begitu siapa yang salah ! Tentunya harus mengamati komponen lain yang terlibat pada masalah banjir dan longsor.

MODEL PEMBELAJARAN YANG DILAKUKAN OLEH TOKOH MASYARAKAT

Tokoh masyarakat pada dasarnya adalah pendidik (guru) yang cukup efektif untuk mempengaruhi, meyakinkan, dan menyadarkan masyarakat pada bahaya banjir dan longsor. Sebagai contoh yang kongkrit, pada hari ini masyarakat di sekitar bahaya letusan gunungapi Merapi oleh pemerintah sudah dihimbau untuk mengungsi bahkan sudah disiapkan kendaraan untuk mengangkut mereka, tetapi masyarakat masih belum mau pindah karena belum mendapat restu dari tokoh masyarakat (sesepuh) yang ada di daerah tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa begitu karismatiknya tokoh masyarakat dalam membentuk image dan keyakinan masyarakat.

Kenyataan tersebut, menunjukkan bahwa tokoh masyarakat, walaupun jumlahnya sedikit tetapi cukup berpengaruh. Oleh karena itu tokoh masyarakat harus menjadi salah satu komponen yang harus menjadi pertimbangan dan harus dilibatkan dalam mengatasi bahaya banjir dan longsor (Kitamura dan Rustandi. 1999). Tokoh masyarakat kadang-kadang memiliki falsafah yang sulit diterjemahkan dengan uraian atau logika masyarakat saat ini, tetapi kalau dicoba untuk direnungi dan dihayati ternyata memiliki nilai-nilai yang arif (saat ini disebut kearifan lokal) sehingga lingkungan tempat tinggal manusia menjadi lestari dan nyaman. Peran tokoh masyarakat sering diwujudkan dalam bentuk: petuah, pandangan, keteladanan, ceramah, maupun nasehat.

Masyarakat suku Sunda dalam meredam amarah alam dan agar hidup damai dengan alam, para sesepuh (tokoh masyarakat) telah memberikan petuah dalam bentuk kearifan lokal masyarakat Sunda seperti tabel berikut ini.

KEARIFAN LOKAL MASYARAKAT SUNDA

Gawir	–	Awian
Gunung	–	Kaian
Pasir	–	Talunan
Cinyusu	–	Rumateun
Sampalan	–	Kebonan
Walungan	–	Rawateun
Dataran	–	Sawahan
Lebak	–	Caian
Legok	–	Balongan
Situ	–	Pulasaraeun
Lembur	–	Uruseun
Basisir	–	Jagaeun

Kearifan lokal tersebut apabila dilaksanakan semua, maka kehidupan masyarakat akan damai, tenang, sejahtera, bahagian secara berkelanjutan, dan apa yang dinikmati oleh kita akan dinikmati juga oleh anak cucu atau generasi yang akan datang (Gilpin, 1996). Kearifan tersebut sudah divalidasi dan diuji oleh masyarakat Suku Naga di Tasikmalaya, padahal Suku Naga hanya menerapkan dua kearifan dari 12 kearifan yang di pesankan yaitu *gunung – kaian*, dan *walungan – rawateun*.

Uraian dan contoh tersebut, kalau kita cermati tokoh masyarakat sudah sangat berperan dalam mengatasi bahaya banjir dan longsor, tetapi mengapa bencana banjir dan longsor semakin sering ? Mungkin tokoh masyarakat perlu mencoba untuk mengubah metode pembelajarannya

kepada masyarakat, yaitu dari berfikir yang sulit dimaknai dan tidak dimengerti oleh logika menjadi penjelasan yang rasional dan mudah dimengerti oleh masyarakat. Tetapi persoalannya tokoh masyarakat mungkin tidak mempunyai kemampuan untuk menjelaskan karena mereka adalah kelompok masyarakat yang tidak biasa berkomentar dan berargumentasi, tetapi mereka adalah kelompok masyarakat yang berfikir, arif, bijak, dan pemberi contoh, bukan hanya menyuruh dan memerintah orang lain. Kalau semacam ini kondisinya jadi sebetulnya siapa yang harus bertanggung jawab terhadap bahaya banjir dan longsor yang sering melanda masyarakat kita ?

PENUTUP

Berdasarkan uraian seperti yang telah dipaparkan sebelumnya, ternyata mulai dari sekolah yang dilakukan oleh para pendidik (guru); masyarakat termasuk LSM; pemerintah termasuk wakil rakyat; dan tokoh masyarakat telah melakukan berbagai upaya yang maksimum dalam upaya meminimalisasi bahaya banjir dan longsor, tetapi nyatanya bencana banjir dan longsor terus terjadi dan semakin intensif.

Strategi yang mungkin harus dilakukan oleh masing-masing komponen adalah dengan cara mensinergikannya, walaupun masing-masing komponen merasa telah maksimum dan optimal, dan juga masing-masing merasa sudah mensinergikan dengan komponen yang lain.

Untuk mengatasi kebuntuan ini nampaknya harus menggunakan pendekatan keagamaan, yaitu dengan cara menghayati dan mengamalkan secara benar ajaran agama yang dianutnya. Apabila semua komponen masyarakat yang terlibat sudah enggan melaksanakan perintah agamanya, maka kita dapat memaknai bahwa bencana banjir dan longsor merupakan azab yang ditimpakan pada manusia agar sadar dan mau kembali pada ajaran yang sebenarnya.

Apabila masyarakat sudah mulai menyadari kekeliruannya dan kembali ke ajaran agamanya maka formula sederhana yang dipesankan oleh tokoh masyarakat Aa Gym dengan pendekatan tiga M (mulai dari diri sendiri, mulai dari yang kecil, dan mulai dari hari ini) akan menjadi solusi yang efektif untuk mengatasi bahaya banjir dan longsor.

DAFTAR BACAAN

- Arsyad, S. 2000. Konservasi Tanah dan Air. IPB Press, Bogor.
- Foresta, H.,A. Kusworo., G. Michon., W.A. Djatmiko. 2000. Ketika Kebun Berupa Hutan Agroforest Khas Indonesia Sebuah Sumbangan Masyarakat. Internasional Centre for Research in Agroforestry, Bogor.
- Gilpin, A. 1996. Dictionary of Environment and Suitable Development. John Wiley & Son, Chichester.
- Kitamura, T., E. Rustandi. 1999. Basic Trends in Land Use/Cover Change in Indonesia. Final report of The LU/GEC. National Intitute for Environmental Studies Environment Agency of Japan.
- Odum, E.,P. 1996. Dasar-dasar Ekologi. Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.

MODEL PEMBELAJARAN PENANGANAN BAHAYA BANJIR DAN LONGSOR^{*)}

MAKALAH

Disampaikan pada Seminar Nasional “Model Pendidikan dan Penanganan Bahaya Banjir dan Longsor”. Di Balai Pertemuan UPI Bandung pada tanggal 27 April 2006.

Oleh:

Dr. Darsiharjo, M.S.

**PANITIA SEMINAR NASIONAL
“MODEL PENDIDIKAN DAN PENANGANAN BAHAYA
BANJIR DAN LONGSOR” BADAN EKSEKUTIF
MAHASISWA KMJP GEOGRAFI – FPIPS
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
2006**